

# Artikel Aprilia anplag.docx

*by*

---

**Submission date:** 28-Mar-2022 04:09PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1794924901

**File name:** Artikel Aprilia anplag.docx (50.7K)

**Word count:** 2971

**Character count:** 20046

## IMPLEMENTASI PROGRAM *THREE END'S* DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo)



Aprilia Pratiwi<sup>1)</sup>, Ahmad Riyadh UB <sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email : [apripratiwi999@gmail.com](mailto:apripratiwi999@gmail.com), [riyadh\\_ub@umsida.ac.id](mailto:riyadh_ub@umsida.ac.id)

**Abstract.** *In the face of the era of globalization, an understanding of violence is needed. The government issued the Three End's program to address the many cases of violence. Moreover, violence against women. In the Implementation of the Three End's Program can not be separated from the existing problems both in terms of government and in terms of community understanding. The lack of public understanding of women's protection makes violence even more violent. This study aims to describe and analyze the implementation of The Three End's program in improving women's protection as well as supporting factors and obstacles in the implementation of The Three End's program in Sidoarjo Regency. This study is a qualitative descriptive study using purposive sampling techniques in determining informants. Informants in this study are the Head of the Women's Rights Protection and Child Protection Section (DP3AKB), the Head of Women Empowerment and Child Protection (DP3AKB), the Head of the Administrative Section (UPTD PPA), the Staffing Manager (DP3AKB), and the Sidokepong Village Community. Data collection techniques through interviews, observations and documentation. Data analysis techniques use an interactive analysis model consisting of data collection, data reduction, data presentation and conclusion withdrawal. The results of the three end's program implementation research in improving women's protection are, communication indicators consisting of transmission dimensions that are on target, dimensions of clarity to get information clearly can directly ask in the local village government, the dimension of consistency in violence complaints is in the UPTD PPA. Human resources are not adequate in quantity, budget resources are inadequate because of covid-19, infrastructure facilities are adequate because of transportation to socialize, and the dimensions of authority have been divided according to their fields. Disposition, dimension of bureaucratic appointment is the authority of BKD and incentive dimension as employee motivation in work. Indicators of bureaucratic structure, dimension fragmentation already consists of several midwives under several sections and SOP dimensions used based on regulations made by DP3AKB. In this study, researchers took the research place in DP3AKB Sidoarjo Regency.*

**Keywords** - Policy Implementation, Three Ends's Program, Women's Protection

**Abstrak.** *Dalam menghadapi era globalisasi, diperlukan pemahaman mengenai kekerasan. Pemerintah mengeluarkan program Three End's untuk mengatasi banyaknya kasus kekerasan. Terlebih lagi kekerasan terhadap perempuan. Dalam Implementasi Program Three End's ini tidak lepas dari permasalahan yang ada baik dari segi pemerintahan maupun dari segi pemahaman masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan perempuan menjadikan kekerasan semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi program Three End's dalam meningkatkan perlindungan perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Three End's di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan. Informan yang dalam penelitian ini yaitu Kepala Seksi Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (DP3AKB), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Kepala Bagian Administrasi (UPTD PPA), Pengelola Kepegawaian (DP3AKB), dan Masyarakat Desa Sidokepong. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian implementasi program Three End's dalam meningkatkan perlindungan perempuan yaitu, indikator komunikasi yang terdiri dari dimensi transmisi yaitu sudah tepat sasaran, dimensi kejelasan untuk mendapatkan informasi dengan jelas bisa langsung menanyakan di pemerintah desa setempat, dimensi konsistensi dalam*

pengaduan kekerasan ada di UPTD PPA. Sumber daya manusia belum memadai secara kuantitas, sumber daya anggaran kurang memadai karena adanya covid-19, sarana prasarana sudah memadai karena adanya transportasi untuk melakukan sosialisasi, dan dimensi kewenangan sudah dibagi sesuai bidangnya. Disposisi, dimensi pengangkatan birokrasi adalah kewenangan dari BKD dan dimensi insentif sebagai motivasi pegawai dalam bekerja. Indikator struktur birokrasi, dimensi fragmentasi sudah terdiri dari beberapa bidan yang dibawah oleh beberapa seksi dan dimensi SOP yang digunakan berdasarkan dari peraturan yang dibuat oleh DP3AKB. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat penelitian di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo.

**Kata Kunci** - Implementasi Kebijakan, Program Three Ends's, Perlindungan Perempuan

## I. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan kemanusiaan yang berakibat kesengsaraan dan perampasan kemerdekaan baik di depan umum atau kehidupan pribadi. Kekerasan pada perempuan memang bukan hal yang baru di dengar. Namun seiring berjalannya waktu, upaya yang dilakukan berbagai pihak dalam menangani kasus seperti ini masih belum mampu memberikan dampak yang signifikan. Kekerasan terhadap perempuan yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia serta bentuk diskriminasi harus segera dihapus. Aturan mengenai larangan kekerasan terhadap perempuan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang dinyatakan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Masyarakat juga dapat diberikan edukasi terkait pentingnya memahami pencegahan terhadap kekerasan pada perempuan. Jika kurangnya pemahaman terhadap pencegahan kekerasan pada perempuan, maka akan semakin melonjaknya angka kekerasan pada perempuan di Indonesia.

Salah satu Kabupaten/Kota di Jawa timur yang memiliki angka kekerasan yang cukup tinggi adalah Kabupaten Sidoarjo. Berikut diagram data yang menunjukkan jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Sidoarjo**

NO	Kategori Kekerasan	2017	2018	2019
1	KDRT	74	60	73
2	Kekerasan Ekonomi	4	11	5
3	Pencabulan	42	8	12
4	Penganiayaan	6	2	3

Sumber : UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo (2020)

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dengan 4(empat) kategori kasus berbeda. Dapat dilihat pada setiap tahunnya, jumlah kasus KDRT (Kekerasan Terhadap Rumah Tangga) di Kabupaten Sidoarjo selalu menempati posisi pertama. Salah satu hal yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan di Kabupaten Sidoarjo ini karena masih minimnya edukasi tentang dampak dari kekerasan terhadap perempuan dan kurangnya sosialisasi mengenai program-program pencegahan dan Undang-undang yang berlaku.

Dikarenakan jumlah kasus kekerasan pada perempuan Indonesia terbilang cukup tinggi, maka pemerintah meluncurkan sebuah program untuk menurunkan angka kekerasan. Pada bulan Maret 2016 lalu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengenalkan program terobosan dalam upaya mengakhiri kekerasan pada perempuan dan anak yaitu program *Three End's*. Dengan adanya program *Three End's* diharapkan bisa mengakhiri tiga masalah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Program *Three End's* adalah program yang dapat mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan manusia, dan juga mengakhiri kesenjangan ekonomi[1].

Setelah diluncurkan program *Three End's*, pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga mulai menerapkan program tersebut pada tahun 2016 dikarenakan angka kekerasan pada perempuan di Kabupaten Sidoarjo

masih terbilang cukup tinggi pada tahun sebelumnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) didampingi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk melaksanakan pembentukan satgas pencegahan kekerasan terhadap perempuan di 5 desa di Kecamatan Jabon dan melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan di seluruh Desa di Kabupaten Sidoarjo. Program ini dilaksanakan dengan cara melakukan pertemuan ditingkat Desa atau Kecamatan, melakukan simulasi, tanya jawab, dan konsep yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kenyamanan bersama antara warga Desa/Kecamatan dengan pelaksana dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Program *Three End's* adalah program pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Program ini bertujuan untuk mengurangi angka kasus kekerasan di Kabupaten Sidoarjo[2].

angka kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Sidoarjo masih mengalami peningkatan dan bahkan masih banyak korban yang tidak melaporkan tindak kekerasan tersebut dikarenakan merasa terancam ataupun khawatir. Oleh karena itu, program *Three End's* yang telah di terapkan oleh pemerintah ini masih dikatakan kurang efektif dalam mencegah peningkatan kasus kekerasan pada perempuan, hal tersebut karena terdapat titik kelemahan pada program tersebut yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan sosialisasi program *Three End's* dan masih kurangnya edukasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap perempuan bukanlah hal sepele. Untuk menghapus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri melainkan perlu bermitra dengan lintas sektor yakni masyarakat itu sendiri, pihak swasta, organisasi masyarakat, perguruan tinggi dan media massa[3].

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Moleong mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2012:4)[4]. Lokasi penelitian berada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo. Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian karena untuk mengetahui bagaimana implementasi program *Three End's* oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan perlindungan perempuan di Kabupaten Sidoarjo, beserta kendala apa saja dalam implementasi program di Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan perlindungan perempuan di Kabupaten Sidoarjo. Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang penting dalam mendapatkan suatu data pada penelitian. Pada penelitian ini sendiri pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penganalisisan menggunakan model interaktif miles dan huberman dalam sugiyono (2011:247)[5].

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan mengenai Implementasi Program *Three End's* Dalam Meningkatkan Perlindungan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo menurut teori dari George C. Edwards III ini memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi[6].

### 1. Komunikasi

Salah satu hal yang berperan penting dalam implementasi kebijakan adalah isi dari suatu kebijakan itu sendiri. Karena suatu kebijakan dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya telah memahami maksud dan tujuan yang dapat dilihat dalam peraturan perundang - undangan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan juga mempunyai kemungkinan untuk gagal karena masih samarnya isi atau kebijakan serta sasaran kebijakan yang kurang jelas. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa proses komunikasi yang terdiri dari transmisi yaitu sudah sesuai sasaran yaitu sosialisasi yang diberikan semua masyarakat. Dalam dimensi kejelasan sudah diberikan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan penguatan pemerintah desa mengenai program. Konsisten yang diberikan yaitu dalam pelaksanaan sosialisasi dan kegiatan pelatihan[7].

### 2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu syarat keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan. Berdasarkan pendapat George C. Edward III, meskipun komunikasi sudah dilaksanakan dengan transmisi, kejelasan dan konsisten, tetapi jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan implementasi, maka kebijakan implementasi akan sulit dilakukan. Dari hasil penelitian oleh penulis bisa ditarik kesimpulan bahwa dalam indikator sumber daya yang meliputi sumber daya manusia di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mengalami kendala yaitu kurangnya staff karena dalam satu kasi hanya terdapat satu anggota saja. Pada sumber daya peralatan di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dari segi sarana prasarana sudah memadai yang menunjang dalam proses pelayanan dan sosialisasi. Sumber daya anggaran yaitu terdapat pengurangan anggaran program yang menyebabkan kurang maksimalnya kegiatan. Sumber daya kewenangan sudah dibagi yang terdapat

6) beberapa bidang dan seksi.

### 3. Disposisi

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) disposisi adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi dan insentif.

Pengangkatan Birokrasi/Jabatan merupakan salah satu faktor yang mendorong staff untuk melakukan tugasnya dengan baik. Karena jika staff bekerja dengan baik maka hal tersebut akan mendapatkan kenaikan jabatan. Dalam DP3AKB pengangkatan pegawai adalah kewenangan dari BKD dan juga kinerja dari laporan Kepala Dinas, setiap tahun selalu membuat target dan perjanjian mengenai kinerja para pegawai dengan kepala Dinas. Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai, DP3AKB mengikutsertakan semua pegawai dalam pelatihan. Insentif yaitu merupakan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Untuk mendapatkan insentif staff harus bekerja dengan sebaik mungkin, karena staff akan mendapatkan insentif apabila telah melakukan target dalam tugas. Dari indikator disposisi sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III yaitu bisa ditarik kesimpulan bahwa pengangkatan birokrasi dan pemberian insentif merupakan faktor penentu yang membuat staff melakukan pekerjaannya dengan sebaik mungkin untuk mencapai keuntungan tersebut.

### 4. Struktur Birokrasi

Pendapat Edward III dalam Widodo (2010:106), struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional (SOP) yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis, struktur organisasi pada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dengan cara dibagi pada setiap bidang, dimana disetiap bidang tersebut terdapat seksi-seksi yang akan berkoordinasi dengan kepala bidang. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Kepala Dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke Kepala Dinas. SOP yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan semua kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah SOP yang dibuat sendiri oleh DP3AKB dan ada 3 SOP alur pengaduan kekerasan yaitu melalui hotline atau telepon, melalui masyarakat atau media, dan secara langsung.

Dalam meningkatkan keberhasilan program tidak akan terlepas dari adanya faktor pendukung dan penghambat. Sama halnya dengan pelaksanaan program *Three End's* ini terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi jalannya program ini.

#### 1. Faktor Pendukung

Dalam meningkatkan keberhasilan program *Three End's* dukungan pemerintah desa sangat diperlukan untuk kesuksesan jalannya program ini. Dukungan yang diberikan Pemerintah Desa dalam meningkatkan program *Three End's* ini memfasilitasi DP3AKB dalam menjalankan tugasnya mulai dari pemenuhan tempat untuk sosialisasi agar kegiatan berjalan dengan maksimal. Dukungan selanjutnya adalah dukungan dari masyarakat, dukungan yang diberikan masyarakat ini dapat dilihat dari seberapa antusiasme masyarakat dalam menerima program *Three End's* ini, masyarakat menganggap bahwa program ini adalah salah satu terobosan pemerintah untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan mencegah kenaikan angka kekerasan[8]. Dukungan selanjutnya yaitu dari dinas, dukungan yang diberikan DP3AKB

mulai adanya program ini yakni mengajak masyarakat mengubah kesejahteraannya dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

## 2. Faktor Penghambat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan menjadi salah satu penghambat dalam meningkatkan implementasi program *Three End's* ini. Dimana sedikitnya pemahaman dari masyarakat bahwa adanya perlindungan perempuan dan tempat pengaduan kekerasan menjadikan angka kekerasan di Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat. Kedua, sedikitnya jumlah staf DP3AKB tidak seimbang dengan banyaknya masyarakat penerima manfaat yang semakin banyak karena itu seringkali Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut turun tangan melakukan sosialisasi. Ketiga, adanya *refocusing* dana yang menyebabkan kegiatan menjadi tidak maksimal. Maka banyak kegiatan yang sementara tertunda dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah pusat ini.

## IV. KESIMPULAN

Indikator komunikasi yaitu pertama, transmisi sudah tepat sasaran karena DP3AKB Kabupaten Sidoarjo sudah melakukan sosialisasi secara langsung dengan masyarakat dan pihak pemerintahan sudah membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di beberapa desa. Kedua yaitu dimensi Kejelasan untuk penyampaian informasi mengenai program *Three End's* sudah cukup jelas dan jika ada yang kurang jelas kita bisa menanyakan langsung kepada pemerintah desa karena DP3AKB selalu melakukan penguatan. Ketiga, konsistensi dalam pelayanan yang diberikan yaitu dengan cara memberikan pelayanan sesuai ketentuan yang konsisten seperti ketentuan waktu saat sosialisasi dilakukan 2 kali dalam 1 tahun dan memberikan pelatihan.

Sumber daya, yang pertama, dimensi sumber daya manusia di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo memiliki kendala kurangnya staff yang bertugas. Kedua yaitu sumber daya anggaran masih ada kendala karena terjadinya pengurangan dana yang telah diajukan. Ketiga, sumber daya peralatan di DP3AKB Kabupaten Sidoarjo cukup baik dan memadai karena DP3AKB memiliki mobil monic, mobil molin, motor, ruang konseling, ruang tunggu dan ruang kerja. Keempat yaitu kewenangan, kewenangan sudah diatur oleh Dinas yang terdiri dari beberapa bidang dan dibawah oleh beberapa seksi.

Disposisi, dimensi pertama yaitu pengangkatan birokrasi sudah diatur dengan baik dan yang berwenang dalam pengangkatan birokrasi adalah BKD dan juga kinerja dari laporan Kepala Dinas. Pada setiap tahun selalu membuat target dan perjanjian mengenai kinerja para pegawai dengan kepala Dinas. Kedua yaitu insentif, telah diupayakan dengan baik karena staff akan mendapatkan insentif apabila telah melakukan target dalam tugas.

Struktur birokrasi, dimensi pertama yaitu struktur organisasi sudah tersusun sesuai fungsi dan tugas masing masing jabatan yang ada dimana kepala dinas menjadi jabatan paling tinggi dan setelahnya dibawah oleh sekretariat dan kepala bidang yang selanjutnya yaitu dibagi menjadi seksi sesuai bidang. Kedua, ada 3 SOP alur pengaduan kekerasan yaitu melalui hotline atau telepon, melalui masyarakat atau media, dan secara langsung.

Faktor pendukung dari Pemerintah Desa dalam meningkatkan program *Three End's* ini memfasilitasi DP3AKB dalam menjalankan tugasnya mulai dari pemenuhan tempat untuk sosialisasi agar kegiatan berjalan dengan maksimal. Dukungan yang diberikan masyarakat ini dapat dilihat dari seberapa antusiasme masyarakat dalam menerima program *Three End's* ini. Ada juga dukungan dari DP3AKB mulai adanya program ini yakni mengajak masyarakat mengubah kesejahteraannya dan mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Faktor penghambat yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan karena Dimana sedikitnya pemahaman dari masyarakat bahwa adanya perlindungan perempuan dan tempat pengaduan kekerasan. Kedua yaitu kurangnya staf DP3AKB di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena itu seringkali Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ikut turun tangan melakukan sosialisasi. Ketiga, kurangnya dana anggaran karena adanya *refocusing* dana yang menyebabkan kegiatan menjadi tidak maksimal.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik karena bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ahmad Riyadh UB, SH., M.Si., Ph.D selaku dosen pembimbing dan Bapak Dimas Nurarif PS, SH selaku asisten dosen pembimbing. Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo dan staf UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo. Bapak/Ibu

dosen dan Staff Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Serta untuk kedua orang tua saya dan rekan-rekan yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

#### REFERENSI

- [1] R.Dye, T. "Teori Kebijakan Publik", (1981)
- [2] Bassant, Watts, Dalton dan Smit. "kebijakan Sosial", (2008)
- [3] Easton, D. "Kebijakan Publik", (1969)
- [4] Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif", (2012)
- [5] miles dan hubermen. "Teknik Penganalisisan Model Interaktif", (2011)
- [6] C. Edward, G. "Teorii Implementasi Kebijakan" (2011)
- [7] Van Meter dan Van Horn. "Pendekatan Implementasi Kebijakan" (1975)
- [8] Salmond. "Teori Perlindungan Hukum", (1966)

# Artikel Aprilia anplag.docx

## ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	9%
2	eprints.undip.ac.id Internet Source	2%
3	gamalamanews.com Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	jmp.ejournal.unri.ac.id Internet Source	2%
6	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%